

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN POTENSI WISATA AIR TERJUN DI DESA TOMPO

Analysis Of The Role Of Village Government In Increasing Community Capacity In
Managing Waterfall Tourism Potential In Tompo Village

Parman¹ Muhammad Nur² Mutmainnah³

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Alamat Email: parmanrianti@gmail.com¹ mutmainnahh2909@gmail.com²

Abstrak

MUTMAINNAH, 2024, dengan judul penelitian "Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Terhadap Pengelolaan Potensi Wisata Air Terjun Di Desa Tompo". Pembimbing 1 Parman pembimbing 2 Muhammad Nur. Skripsi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan potensi wisata air terjun di Desa Tompo dan bagaimana peran pemerintah desa terhadap pengelolaan potensi wisata air terjun di Desa Tompo. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menggunakan informan sebagai responden. Hasil penelitian yaitu pemerintah desa dalam menjalankan peran untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan potensi wisata air terjun, melalui tahapan pemberdayaan yaitu seleksi lokasi/wilayah, sosialisasi pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan masyarakat, pemandirian masyarakat, selain itu terdapat konsep yang ditawarkan yaitu fasilitator dan regulator. namun selain itu ditemukan hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana dan konsisi lingkungan fisik. Adapun kendala dalam pengembangan potensi wisata ini yaitu kurangnya fasilitas objek wisata, akses jalan yang kurang baik dan anggaran yang terbatas.

Kata Kunci; Pemerintah Desa, Kapasitas Masyarakat, Potensi Desa

Abstract

MUTMAINNAH, 2024, with the research title "Analysis of the Role of Village Government in Increasing Community Capacity in Managing Waterfall Tourism Potential in Tompo Village". Supervisor 1 Parman, supervisor 2 Muhammad Nur. Thesis for the Regional Management Study program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Parepare (UMPAR).

This research aims to determine the role of the village government in increasing community capacity in managing waterfall tourism potential in Tompo Village and what the role of the village government is in managing waterfall tourism potential in Tompo Village. The data collection techniques used in this research are interviews and documentation. This research method is descriptive qualitative which uses informants as respondents. The village government carries out its role in increasing community capacity in managing waterfall tourism potential, through empowerment stages, namely location/region selection, community empowerment outreach, community empowerment process, community self-reliance, apart from that there are concepts offered, namely facilitator and regulator. However, apart from that, obstacles were found in implementing community empowerment, such as limited human resources, limited facilities and infrastructure and the condition of the physical environment. The obstacles in developing this tourism potential are the lack of tourist attraction facilities, poor road access and limited budget.

Keywords; Village Government, Community Capacity, Village Potential



DECISION : Jurnal Ekonomi dan Bisnis

ISSN. 2721-4907

Volume 1, Nomor 1, 27 Agustus 2024

PENDAHULUAN

Masyarakat desa pada umumnya sebagian besar dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Pemenuhan akan kebutuhan mereka pun rasanya masih sulit untuk terpenuhi. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pembangunan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari pembangunan bagian kecilnya sekalipun, yaitu desa.

Kemajuan perekonomian desa-desa dan semua wilayah atau dengan kata lain pemerataan kemajuan ekonomi merupakan target penting dalam pembangunan ekonomi negara. Sejak masa sebelum kemerdekaan sehingga pasca kemerdekaan, desa selalu ditempatkan dalam posisi marginal baik oleh pemerintah maupun oleh kelompok elit perkotaan. Marginalisasi tersebut disebabkan berbagai keterbatasan yang disandang masyarakat desa, seperti tingkat pendidikan yang rata-rata masih rendah, pendapatan per kapitanya kecil, maupun fasilitas sosial yang dimilikinya. Keterbatasan yang disandang desa tersebut tampaknya cenderung dipertahankan dengan asumsi untuk memperoleh keuntungan dari kondisi semacam itu, yaitu untuk menciptakan posisi tawar yang lemah bagi desa terhadap kekuasaan supra desa. Lebih jauh lagi secara administratif pemerintah, desa lebih diposisikan sebagai obyek kekuasaan.

Dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel. Perlu dikedepankan oleh pemerintah desa adalah bagaimana pemerintah desa mampu membangun, meningkatkan dan mendayagunakan kelembagaan desa yang kondusif, sehingga dapat mendesain standar pelayanan masyarakat yang mudah, murah dan cepat. Dari segi politis selama ini desa dijadikan tempat pengumpulan suara pada waktu pemilu, setelah itu dilupakan. Sedangkan secara ekonomis, desa dipandang sebagai sumber bahan baku dan tenaga kerja yang murah. Penyeragaman dalam pengaturan Pemerintahan desa pada masa lalu telah menjadikan rendahnya partisipasi masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan desa dalam era otonomi saat ini. Kreativitas dan partisipasi tersebut sangatlah, dibutuhkan dalam pelaksanaan etonomi desa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Secara faktual, pada perkembangannya bentuk sebagian besar desa di Indonesia pada hakekatnya sampai sekarang masih tetap merupakan kesatuan masyarakat hukum asli, dengan berlandaskan pada aturan hukum adat. Oleh karenanya pemerintahan desa yang lahir dari sistem hukum yang berlaku bersifat demokratis sesuai dengan filosofi terbentuknya desa dan diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan 3 (tiga) peran utamanya yaitu: sebagai struktur perantara, sebagai pelayan masyarakat, sebagai agen pembaharuan.

Desa memiliki otonomi tradisional, artinya desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat. Hakekatnya otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah. Otonomi desa merupakan otonomi yang telah ada sejak desa itu terbentuk berdasarkan adat istiadat dan tidak merupakan penyerahan dari pemerintah. Dengan demikian otonomi desa dikatakan sebagai otonomi murni. Urusan rumah tangga desa diperoleh tidak berdasarkan asas desentralisasi melainkan berdasarkan tradisi atau adat yang berlaku.

Upaya untuk mengembangkan pariwisata di suatu daerah dapat dilakukan dengan identifikasi potensi wisata di suatu kawasan sebagai daya tarik wisata. Potensi wisata tersebut pada dasarnya ada dua potensi utama yaitu potensi fisik atau kenampakan alam dan interaksi budayanya. Sedangkan potensi yang lain hanyalah potensi pendukung atau potensi penunjang saja. Misalnya terdiri dari aksesibilitas, fasilitas, infrastruktur, keramah tamahan, keamanan, badan pengelola atau manajemen, promosi dan informasi, serta kondisi sosial budaya masyarakat sekitar objek wisata (Aprilianti, 2017).

Obyek wisata alam yang tersebar di laut, pantai, hutan, danau dan pegunungan adalah produk-produk potensial yang dapat dikembangkan untuk kegiatan wisata alam. Setiap produk wisata alam memiliki tingkat amenitas atau fasilitas, aksesibilitas, daya tarik, serta nilai daya saing tersendiri. Keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna, keunikan, keindahan bentang alam serta gejala alam merupakan salah satu aspek penting yang menjadi Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA). (Rusita dkk, 2016)

Dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya pembangunan masyarakat desa dapat dilakukan dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang ada. Namun persoalan yang

terjadi adalah kadangkala potensi tersebut tidak terkenali dengan baik, sehingga potensi dan sumber daya yang ada sering kali tidak didaya gunakan secara optimal. Oleh karena itu, pengenalan terhadap potensi yang dimiliki masyarakat sangat dibutuhkan untuk dimanfaatkan dalam pemecahan masalah kesejahteraan sosial.

Dalam rangka mengembangkan pendapatan asli desa atau aset desa yang menjadi sumber utama dalam pembangunan desa dan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Terlebih khusus potensi desa yang belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara baik, jujur dan benar hal ini terlihat masih banyak keluhan masyarakat dalam perbaikan jalan sepanjang area penambangan pasir oleh pemerintah desa, begitu juga masih banyak pertanyaan yang timbul dari masyarakat terkait biaya distribusi untuk perbaikan jalanan karena tidak ada transparansi oleh pemerintah desa pada seluruh masyarakat.

Dalam melakukan pengembangan potensi wisata perlu melibatkan partisipasi masyarakat secara proporsional. Hal ini diperlukan agar setiap program pengembangan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, mulai dari pendataan, pengkajian, pengerjaan proyek, pemanfaatan hingga pemeliharaan. Dengan mengembangkan partisipasi masyarakat maka pembangunan akan lebih efektif dan efisien karena masyarakat akan lebih bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pembangunan, mereka merasa ikut memiliki setiap hasil pembangunan desa.

Dalam melakukan pengembangan potensi wisata perlu melibatkan partisipasi masyarakat secara proporsional. Hal ini diperlukan agar setiap program pengembangan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, mulai dari pendataan, pengkajian, pengerjaan proyek, pemanfaatan hingga pemeliharaan. Dengan mengembangkan partisipasi masyarakat maka pembangunan akan lebih efektif dan efisien karena masyarakat akan lebih bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pembangunan, mereka merasa ikut memiliki setiap hasil pembangunan desa.

Desa Tompo memiliki potensi wisata air terjun sarang burung Air terjun ini mulai dikunjungi pada tahun 1995 yang berfungsi sebagai objek wisata yang berpotensi, selama 5 tahun air terjun ini sangat sering dikunjungi baik dari masyarakat setempat ataupun luar daerah yang mengetahui tempat wisata ini karena pada tahun 2001 terjadi peristiwa yang memakan korban sehingga menyebabkan air terjun di Desa Tompo sepi pengunjung. Pada tahun 2007 pemerintah desa melakukan inisiatif untuk melakukan program perbaikan akses jalan ke tempat wisata bersama masyarakat setempat walaupun program perbaikan jalan ini belum sampai ke lokasi karena dana yang tidak mencukupi. Di tahun 2007 sampai 2016 wisata air terjun ini dikunjungi oleh banyak kalangan masyarakat karena akses jalan serta teknologi yang canggih sehingga masyarakat luar dapat mengakses tempat wisata ini melalui aplikasi maps.

Program perbaikan jalan mulai dipertimbangkan kembali di tahun 2016, sejak saat itu pemerintah desa dan aparat desa tidak akur dengan masyarakat disekitar air terjun disebabkan masyarakat setempat menginginkan dana sebesar 20% dari aparat desa, namun pemerintah desa tidak menyanggupi permintaan tersebut. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Terhadap Pengelolaan Potensi Wisata Air Terjun Di Desa Tompo.”**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Menurut Sugiyono (2017) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilandaskan pada post-positivisme sehingga tepat digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Penelitian ini berlokasi di Desa Tompo Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Lokasi penelitian dipilih sebagai tempat penelitian karena permasalahan yang akan dibahas berada di lokasi tepatnya di Desa Tompo. Waktu penelitian ini akan dilakukan kurang lebih 2 bulan dari bulan 05 April hingga 30 Juni 2024. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang terdiri dari Kepala Desa (Kades), Mantan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Staff Aparat Desa, Masyarakat. Jenis dan metode sampling dalam penelitian pelaksanaan Program DMIJ ini menggunakan Teknik Sampling Jenuh untuk Perangkat Desa dan Teknik Sampling Aksidental untuk Tokoh Masyarakat. Teknik Pengumpulan Data yaitu pengamatan (*Observasi*), Wawancara (*Interview*), Dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-

orang, perilaku yang dapat diamati sehingga menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Dalam pengelolaan Potensi Wisata Air Terjun di Desa Tompo

Desa Tompo merupakan salah satu desa di Kecamatan Barru yang memiliki potensi yang cukup besar terutama dibidang pariwisata. Potensi desa tompo dapat dilihat pada potensi desa yaitu air terjun sarang burung yang terletak di Dusun Batulappa. Dengan jarak sekitar 1,5 km dari jalan umum. Wisata air terjun ini terkenal dengan keindahan dan kebersihannya yang terjaga sekaligus dijadikan sebagai sumber mata air untuk masyarakat sekitar.

Peran pemerintah desa terhadap pengembangan potensi wisata. Potensi wisata yang ada di Desa Tompo salah satunya adalah Air Terjun Sarang Burung dengan melihat bahwa perkembangan potensi ini jika dikembangkan dan diolah dengan baik maka wisata ini dapat menjadi salah satu destinasi wisata yang potensial.

Air terjun ini dijadikan sebagai objek wisata pada tahun 1995, selama 5 tahun air terjun ini sangat sering dikunjungi baik dari masyarakat setempat ataupun luar daerah yang mengetahui tempat wisata ini, pada tahun 2001 terjadi peristiwa yang memakan korban sehingga menyebabkan air terjun di Desa Tompo sepi pengunjung. Di tahun 2007 sampai sekarang wisata air terjun ini dikunjungi lagi oleh banyak kalangan masyarakat. Walaupun pengunjung yang sekarang tidak seramai di tahun sebelumnya.

Pengembangan desa wisata Air Terjun Sarang Burung masyarakat berpartisipasi penuh baik dalam tahap pengembangannya maupun tahap perencanaan. Masyarakat desa Tompo melakukan musyawarah untuk mengembangkan desa wisata Air Terjun Sarang Burung dengan melibatkan sepenuhnya kepada masyarakat desa, pada tahap implementasi semua masyarakat setempat terlibat dalam pengelolaan potensi lokal yang ada di Desa Tompo dalam tahap pengawasan masyarakat diawasi dan di kontrol oleh pemerintah desa.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan kemandirian masyarakat dalam mengelola kegiatan yang ada di desa tersebut. Kemandirian masyarakat meliputi mandiri berfikir, bertindak dan mengendalikan serta pengelolaan yang akan mereka lakukan. Kemandirian masyarakat yang dialami oleh masyarakat tersebut ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi.

Namun, penulis menganalisis hambatan yang ada dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Tompo. Berdasarkan hasil penelitian, masalah yang terdapat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat adalah:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Adapun faktor penghambat pengembangan Potensi Wisata Air Terjun Sarang Burung adalah keterbatasan sumber daya manusia yang meliputi adanya perbedaan kepentingan dan kepercayaan masyarakat. Namun masyarakat belum memahami posisinya dalam pemberdayaan, serta latar belakang pekerjaan masyarakat. Masih ada masyarakat yang belum mau terlibat dalam pengelolaan potensi wisata Air terjun sarang burung

Aparat desa Tompo, hingga kini masih bersinergi melakukan musyawarah, pendekatan baik secara personal maupun berkelompok, dengan adanya sosialisasi serta pembinaan, agar masyarakat memiliki minat untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan. Aparat desa berusaha meyakinkan tokoh masyarakat bahwa pengelolaan dan pengembangan potensi wisata Air Terjun Sarang Burung dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menunjang perekonomian masyarakat sekitar.

b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di Desa Tompo masih jauh dari harapan, seperti tidak adanya lahan parkir, toilet, ruang ganti, gazebo, dan lain sebagainya. Keterbatasan seperti ini sewaktu-waktu dapat menghambat kegiatan di desa. Padahal, keberadaan sarana dan prasarana akan sangat menentukan mobilitas dan produktivitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas pemberdayaan.

Langkah sementara yang tengah diupayakan oleh aparat desa adalah dengan memaksimalkan fasilitas yang ada dan dana yang tersedia. Disamping itu, aparat desa dan masyarakat senantiasa berkolaborasi untuk meyakinkan para pengunjung bahwa keterbatasan-keterbatasan itu tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.

c. Kondisi Lingkungan Fisik

Lingkungan fisik Air Terjun di Desa Tompo masih jauh dari kata sempurna. Lingkungan di sekitar Air Terjun tersebut masih perlu di kaji ulang dan memerlukan banyak pembenahan dari masyarakat dan pemerintah setempat. Pembenahan ini dapat dimulai dari kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan terlibat aktif dalam penyelenggaraan bina lingkungan. Melalui keterlibatan yang aktif, masyarakat diharapkan dapat memberikan dampak nyata sehingga memberikan pengaruh yang baik terhadap kelestarian lingkungan sekitar

B. Peran Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Potensi Wisata Air Terjun Di Desa Tompo

Potensi pariwisata dapat dikembangkan menjadi daya tarik atau destinasi wisata karena didukung oleh keindahan alam yang bersifat alami, daya tarik wisata juga masih sangat asli, dan ada kunjungan wisatawan dalam jumlah kecil dan mereka masih leluasa dapat bertemu dan berkomunikasi serta berinteraksi dengan penduduk lokal. Karakteristik ini cukup untuk dijadikan alasan pengembangan sebuah kawasan menjadi sebuah destinasi atau daya tarik wisata.

Destinasi atau daya tarik wisata banyak dijumpai di daerah Kabupaten Barru, baik potensi kesenian, sejarah dan budaya, serta kehidupan masyarakat. Dari sekian banyaknya aktifitas wisata yang dapat di jumpai di Kabupaten Barru, yang menarik perhatian adalah wisata alam. Peningkatan potensi pariwisata air terjun di Desa Tompo membutuhkan peran dari pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan lembaga atau kelompok yang mempunyai kedudukan di tingkat wilayah, dengan begitu sangat berperan dalam peningkatan potensi pariwisata air terjun di Desa Tompo. Wisata Air Terjun Desa Tompo sendiri merupakan salah satu air terjun dari beberapa air terjun yang ada di Kabupaten Barru yang memiliki keindahan alam yang fantastis dan masih asli, dengan demikian air terjun Desa Tompo memiliki potensi untuk dijadikan objek wisata unggulan di Kabupaten Barru.

Pengembangan wisata, tentu mempunyai masalah di berbagai sektor yang harus di atasi. Adapun beberapa masalah di berbagai sektor dalam pengembangan wisata alam air terjun ini, adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Fasilitas di Obyek Wisata

Fasilitas di salah satu obyek wisata di desa Tompo yaitu pada Wisata Air Terjun Sarang Burung. Fasilitas wisata ini masih belum memadai dan masih kurangnya fasilitas seperti warung atau lapak yang menjual makanan dan minuman, mushalla, gazebo, dan fasilitas lainnya. Kurangnya fasilitas wisata ini akan mengganggu kenyamanan pengunjung saat datang ke Lokasi.

Fasilitas ini sangat dibutuhkan oleh pengunjung dalam menunjang aktifitas mereka saat berwisata. Selain itu, fasilitas juga dibutuhkan untuk menunjang keberlangsungan dari kegiatan pariwisata terutama pada obyek wisata Air Terjun Sarang Burung. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fasilitas wisata sangat dibutuhkan oleh pengunjung karena hal ini menjadi nilai tersendiri bagi kebutuhan pengunjung juga.

2. Akses Jalan ke Obyek Wisata Yang Belum Mendukung

Akses jalan menuju Desa Tompo memang sudah cukup memadai. Namun, di satu sisi akses jalan menuju lokasi juga tidak luput dari perhatian pengunjung yang berkunjung ke air terjun sarang burung yang ada di desa Tompo.

Kondisi akses jalan masuk menuju lokasi yang belum memadai mempengaruhi kenyamanan dari para pengunjung. Mereka berharap bahwa akses jalan menuju lokasi air terjun sarang burung bisa di perbaiki. Jadi, dapat disimpulkan bahwa akses mempunyai peran penting di dalam pariwisata.

3. Anggaran Yang Terbatas

Anggaran untuk pengembangan pariwisata di desa Tompo khususnya untuk obyek wisata air terjun sarang burung saat ini mengandalkan dana desa. Selain itu juga, dana bantuan dari pihak pemerintah. Akan tetapi, dana tersebut belum mencukupi secara penuh dan masih banyak kekurangannya baik untuk fasilitas ataupun segala hal yang menunjang pariwisata itu sendiri. Anggaran dana merupakan hal yang paling penting, karena tanpa adanya dana yang mencukupi maka keberlangsungan kegiatan maupun program tidak akan berjalan dengan baik dan maksimal.

Adapun konsep yang ditawarkan pemerintah desa dalam mengembangkan objek wisata Air Terjun Desa Tompo maka penulis mencoba menggambarkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan regulator.

1. Sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang permodalan dan pendanaan melalui pemberian bantuan modal.

a. Membangun Sarana dan Prasarana

Dari hasil observasi, pelayanan pemerintah dalam pengelolaan objek wisata alam air terjun Desa Tompo terhadap pengunjung, pemerintah desa memiliki inisiatif tersendiri untuk menyediakan sarana dan prasarana. Namun perlu juga di adakan promosi agar wisata air terjun ini dapat di ketahui oleh masyarakat dan pengguna internet. Namun sistem promosi yang dijalankan pada kepariwisataan Desa Tompo hanya sekedar sistem promosi dengan melalui komunikasi antar muka, media cetak dan media telekomunikasi meskipun belum efektif namun setidaknya sudah ada usaha pemerintah desa untuk mengembangkan tempat wisata yang ada di Desa Tompo.

Informasi yang diberikan melalui situs internet saat ini masih banyak keterbatasan informasi untuk mempromosikan dan mengenalkan Pariwisata Desa Tompo khususnya objek wisata alam Air Terjun Sarang Burung kepada masyarakat luas. Selain informasi-informasi yang diberikan tersebut belum memasukkan potensi-potensi yang ada serta kurangnya inovasi penggunaan teknologi informasi seperti pengadaan akun sosial media tersendiri.

Keuntungan penggunaan internet adalah ketersediaan selama 24 jam, pencarian informasi yang sangat cepat dan mudah dapat dilakukan dengan fasilitas googling. Dengan sekian banyak fasilitas, tentunya informasi khususnya tentang destinasi wisata dapat lebih mudah diakses dan disebarluaskan dengan sangat cepat dibandingkan dengan mencari informasi melalui media cetak atau dari mulut ke mulut. Selain sebagai media penyedia informasi juga dapat memudahkan pengunjung untuk berinteraksi dengan operator pariwisata. Namun hingga saat ini operator pariwisata yang telah memanfaatkan internet untuk melayani pelanggannya masih belum ada.

Wisata air terjun di desa tompo menjadi salah satu destinasi pariwisata favorit masyarakat di Kabupaten Barru pada hari libur sekolah. Kawasan objek wisata ini di anggap sangatlah potensial dan belum mendapat ekspos secara penuh. Selain itu perjalanan dari jalanan umum ke lokasi wisata memakan waktu (kurang lebih 40 menit) karena banyaknya tanjakan dan apabila telah turun hujan maka jalanan licin.

Kabupaten Barru memiliki potensi objek wisata alam, budaya, dan kuliner yang tak kalah dengan daerah lain. Posisi sektor pariwisata kabupaten Barru menjadi salah satu pilar yang sangat berpengaruh dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Oleh karena itu, perhatian pemerintah terhadap pengembangan pariwisata akan

bertambah besar dan pembangunan pariwisata menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Kabupaten Barru sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki beragam objek wisata yang berpotensi bagi pengembangan pariwisata, namun dengan berbagai keterbatasan maka pengembangan pariwisata belum berjalan baik. Selain memiliki objek wisata alam, ada terdapat objek-objek wisata lainnya dan untuk saat ini pemerintah setempat berusaha mengembangkan objek wisata dengan memberikan berbagai sarana penunjang untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata baik dari dalam maupun dari luar.

Pengelolaan objek wisata alam air terjun sarang burung masih memiliki banyak kekurangan dalam hal pengelolaannya. Pengelolaan objek wisata alam air terjun sarang burung tidak terlepas dari campur tangan masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah desa berharap agar masyarakat yang ada di sekitar objek wisata alam air terjun sarang burung tetap menjaga keindahan dan kebersihan wisata alam. Oleh karena itu harus ada kerja sama pemerintah dengan masyarakat karena masyarakat yang akan menjaga dan membersihkan objek wisata tersebut.

Program pengelolaan objek wisata alam merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas objek wisata dan meningkatkan jumlah pengunjung. Namun pengelolaan objek wisata ini masih minim. Tapi dengan adanya objek wisata ini masyarakat setempat memiliki banyak peluang untuk membuka lapangan kerja. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar objek wisata air terjun sarang burung karena mendapat peluang untuk membuka usaha meskipun kecil. Selain itu pemerintah juga sangat bangga dengan kerja sama yang baik dari masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan di lokasi objek wisata tersebut.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pengelolaan objek wisata, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat di sekitar lokasi adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan potensi-potensi objek wisata yang ada untuk menunjang kepariwisataan di Daerah Kabupaten Barru.
- 2) Mempromosikan objek-objek wisata alam melalui media elektronik, media cetak, ataupun dari individu ke individu lain.
- 3) Membangun segala fasilitas yang dibutuhkan oleh pengunjung dalam kegiatan liburan, agar pengunjung merasa aman, nyaman dan akhirnya berkeinginan untuk berkunjung kembali.
- 4) Meningkatkan kemampuan serta keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal memberikan pelayanan kepada pengunjung.

2. Sebagai Regulator

Sebagai regulator, pemerintah memberikan referensi kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan .

a. Aturan retribusi karcis/tiket pengunjung

Retribusi merupakan pungutan biaya yang di pungut sesuai aturan-aturan yang telah di sepakati pemerintah desa bersama masyarakat setempat. Dari hasil observasi, setiap pengunjung yang datang ke objek wisata alam air terjun sarang burung tidak dikenakan biaya atau gratis bagi semua orang Aturan larangan membawa senjata tajam dan obat terlarang. Objek wisata alam air terjun sarang burung merupakan objek wisata di Kabupaten Barru, untuk memasuki kawasan objek wisata alam ini pengunjung di larang membawa benda tajam dan obat-obat terlarang.

b. Aturan larangan membawa senjata tajam dan obat terlarang

Objek wisata alam air terjun sarang burung merupakan objek wisata di Kabupaten Barru, untuk memasuki kawasan objek wisata alam ini pengunjung di larang membawa benda tajam dan obat-obat terlarang. bahwa untuk memasuki objek wisata ini pengunjung di larang membawa senjata tajam, karena benda tersebut dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain, begitu pula dengan obat terlarang pengunjung di larang membawa obat-obat terlarang ketika

memasuki objek wisata alam ini karena akan dikenakan hukuman sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

C. Pembahasan

1. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Dalam pengelolaan Potensi Wisata Air Terjun di Desa Tompo

Objek wisata air terjun sarang burung merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup terkenal di Kabupaten Barru, yang informasinya dapat ditemukan di berbagai media elektronik, air terjun ini terkenal akan keindahan alamnya. Dalam mengelola tempat wisata ini, pemerintah desa tompo berusaha melakukan pemberdayaan, agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam perencanaan pengelolaan air terjun srang burung.

Perlibatan masyarakat ini merujuk pada pendapat Ade dan Risna (2021) bahwa dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata, masyarakat sangat berpartisipasi dalam pembangunan merupakan hal yang penting ketika diletakkan atas dasar keyakinan bahwa masyarakatlah yang paling tahu apa yang dibutuhkan. Partisipasi yang hakiki akan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan tahapan pengembangan, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan program pengembangan desa wisata. Keikutsertaan masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh kemauan, kesempatan, dan kemampuan dari masyarakat tersebut. Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan desa wisata dapat mendorong mereka berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

Tyas (2019) dalam penelitiannya juga menguraikan bahwa pengembangan desa wisata berbasis masyarakat merupakan kegiatan pembangunan desa yang sepenuhnya melibatkan masyarakat lokal sebagai pemegang kepentingan. Secara formal pengembangan wisata berbasis masyarakat ini merupakan kebijakan resmi pemerintah sebagaimana tersirat dalam prinsip kepariwisataan Indonesia yang dirumuskan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Berdasarkan temuan, penulis mendapatkan gambaran bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal di desa Tompo yang dikembangkan menjadi desa wisata merupakan upaya yang baik untuk menciptakan lapangan kerja, sehingga mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Penekanan serupa juga dikemukakan oleh Tyas (2019) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat serta martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat dinilai sebagai salah satu pendekatan yang sesuai dalam mengatasi masalah sosial terutama kemiskinan yang dilakukan berbagai elemen mulai dari pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat melalui sebuah organisasi yang melibatkan sebagian masyarakat setempat.

2. Peran Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Potensi Wisata Air Terjun Di Desa Tompo

Peningkatan potensi pariwisata air terjun di Desa Tompo membutuhkan peran dari pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan lembaga atau kelompok yang mempunyai kedudukan di tingkat wilayah, dengan begitu sangat berperan dalam peningkatan potensi pariwisata air terjun di Desa Tompo.

Hal ini sejalan dengan pendapat Nurfadilla (2018) bahwasanya dengan pengelolaan yang baik, pariwisata berperan untuk memberdayakan sumber daya yang langka serta menjadikan industri pariwisata dapat diperpanjang siklus hidupnya dan berkelanjutan. Dalam pengembangan strategi pariwisata dan kebijakan, otoritas yang bertanggung jawab, harus mempertimbangkan pandangan dari sejumlah pemangku kepentingan termasuk industri, penduduk, kelompok khusus yang mewakili kepentingan lingkungan dan masyarakat, serta wisatawan sendiri. (Nurfadila,2018).

Dalam penelitian Ilham Zitri, Yudhi Lestanata, dan Inka Nusamuda Pratama (2020) dengan judul Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Obyek Wisata Berbasis Masyarakat. Hasil penelitian yaitu pengembangan obyek wisata berbasis masyarakat sudah diterapkan dan dilaksanakan sesuai prinsip dari konsep pariwisata berbasis masyarakat, Dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat masih terdapat beberapa hambatan yaitu rendahnya sumber daya manusia (SDM) di Desa Poto Tano sehingga sulit untuk mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat serta fasilitas terbatas (sarana dan prasarana).

Adapun penelitian Resti (2018) berjudul Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Objek Wisata Pantai Meleura Di Desa Lakarinta Kecamatan Lohia Kabupaten Muna, hasil penelitian strategi yang bisa dilakukan pemerintah desa dalam mengembangkan objek wisata pantai meleura antara lain: meningkatkan promosi objek wisata, meningkatkan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang menunjang seperti pembuatan taman wisata, pembuatan air terjun, perluasan parkir, penataan parkir, pelebaran jalan, penyediaan kuliner khas muna, penyediaan wahana air seperti baban boat, aquarium bawah laut, dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya, sehingga menarik dan memberi kenyamanan bagi pengunjung serta mengadakan akomodasi pariwisata baik itu hotel, maupun villa, serta mengembangkan atraksi wisata dan melakukan koordinasi dengan pihak swasta untuk menanamkan modal agar pengembangan pantai meleura cepat terlaksana.

Berdasarkan tiga penelitian tersebut ditemukan perbedaan dengan penelitian Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Terhadap Pengelolaan Potensi Wisata Air Terjun Di Desa Tompo. Hasil penelitian ini menunjukkan pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas Masyarakat dalam pengelolaan potensi wisata air terjun melalui beberapa tahapan pemberdayaan seperti: lokasi/wilayah, sosialisasi pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan masyarakat, pemandirian masyarakat. Serta pemerintah desa dalam menjalankan pengelolaan wisata air terjun dilihat pada konsep yang ditawarkan yaitu fasilitator yakni membangun sarana dan prasarana, melakukan pemberdayaan masyarakat dan regulator yaitu aturan retribusi karcis/tiket pengunjung, aturan larangan membawa senjata tajam dan obat terlarang. Dapat dilihat adanya perbedaan dari strategi maupun konsep yang digunakan pihak pemerintah desa karena kondisi dan permasalahan yang berbeda dari tiap daerah.

Kesamaan dari penelitian ini dan kedua penelitian terdahulu adalah strategi yang dilakukan pemerintah desa dalam mengembangkan objek wisata yaitu memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang menunjang. Adapun, hambatan yang muncul adalah keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya fasilitas penunjang bagi wisatawan seperti, toilet atau kamar ganti disebabkan anggaran pemerintah desa yang terbatas.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan dijelaskan pada pembahasan mengenai peran pemerintah Desa dalam meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap pengelolaan potensi wisata air terjun di Desa Tompo, serta penjelasan teori dan kondisi yang terjadi di lokasi penelitian yang telah dituliskan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan potensi wisata air terjun di Desa Tompo, melalui beberapa tahapan pemberdayaan yaitu: seleksi lokasi/wilayah, sosialisasi pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan masyarakat, pemandirian masyarakat. Selain itu, selama penelitian peneliti menemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, yaitu: keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kondisi lingkungan fisik.
2. Pemerintah desa dalam menjalankan pengelolaan wisata air terjun di Desa Tompo dapat dilihat pada konsep yang ditawarkan yaitu fasilitator yakni membangun sarana dan prasarana, melakukan pemberdayaan masyarakat dan regulator yaitu aturan retribusi karcis/tiket pengunjung, aturan larangan membawa senjata tajam dan obat terlarang.



Penulis pula menemukan kendala yang ditemukan dalam pengembangan potensi desa ini, sebagai berikut: kurangnya fasilitas objek wisata, akses jalan ke wilayah potensi wisata yang tidak mendukung, serta anggaran yang terbatas.

Saran

Adapun hal yang dapat disarankan kepada pemerintah Desa Tompo dalam meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap pengelolaan potensi wisata Air Terjun Desa Tompo sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa dalam mengembangkan potensi wisata seharusnya lebih mengutamakan saranan dan prasarana, infrastruktur yang memadai, melakukan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan ekonomi lokal.
2. Pemerintah Desa seharusnya lebih meningkatkan keuntungan sosial, seperti mengedepankan peran masyarakat dalam pengembangan desa wisata, serta memberikan pendampingan terhadap masyarakat dalam pengelolaan potensi wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Jafar Sidiq Dan Risna Resnawati.2021.“Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Linggajati Kuningan,” Proseding KS :Risert dan PKM.
- Aprilianti, Dian. 2017 “Penilaian Potensi Objek Wisata Air Terjun Puteri Malu Kampung Jukuh Batu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.”.Universitas Lampung
- Eman, Ireyn Olivia. Sagay, Benny A.B, Jocom, Sherly G. 2018. Strategi Pengembangan Objek Wisata Danau Linouw Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. Jurnal Ag ri-Sosio Ekonomi Vol.14 No.1 . Universitas Sam Ratulangi
- Farid, Ferdian. 2022. Peran Pemerintah Desa Senggigi Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Senggigi Di Desa Senggigi Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Skripsi. Universitas Islam Negeri Mataram. Mataram
- Fenti Prihatini Tui, Rosman Ilato, Rusli Isa, Juriko Abdussamad, Arif Bobihu, Mutia Hunaini.2023. Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Di Kawasan Pesisir Kabupaten Bone Bolango. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminstrasi dan Pelayanan Publik Vol.10 No.1. Universitas Bina Taruna Gorontalo
- Iwan, Supranata.2021. “Strategi Pemerintahan Desa Tuo Dalam Pengembangan Potensi Wisata Air Terjun Sigerincing Di Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurei Kabupaten Marangin.
- Karlana, Titis. 2022. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Nurfadilla.2018. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Lewaja Dikabupaten Enrekang.
- Ruslan, Rosady. 2006. Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi,. Konsepsi dan Aplikasi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Septi Dwi Rahayu.2019. Potensi Wisata Danau Kualomudo Di Kelurahan Balai Makam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.Skripsi. Fakultas Teknik Universitas Islam Riau
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta
- Sukardi. (2016). Desain Model Prakarya dan Kewirausahaan Berbasis Ekonomi Kreatif Berdimensi Industri Keunggulan Lokal. Jurnal Pendidikan